

Dinamika interaksi stakeholder dalam pengelolaan Wisata Alam Maima Kabupaten Sigi

Arman Maiwa^{1*}, Abdul Rahman¹, Golar¹, Rhamdhani Fitrah Baharuddin¹, Amati Eltriman Hulu²

¹Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

²Lembaga Riset Mahasiswa Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia
E-Mail: armanmaiwa88@gmail.com

Artikel diterima :20 Mei 2024 Revisi diterima 14 September 2024

ABSTRACT

Sigi Regency, Central Sulawesi, has strategic natural tourism potential in Lawua Village, especially the Natural Maima tourist attraction. Management of this destination involves various stakeholders, including the Village Government, BUMDES Lawua, POKDARWIS, and BBTNNL. This research aims to analyze collaborative strategies for managing Maima Nature Tourism. The method used in this research is 4Rs to see roles stakeholder, influence and importance analysis to see the level of influence and importance stakeholder and quantitative descriptive to describe the dynamics that occur in the management of Maima natural tourism. The results of this study found that there were 13 (thirteen) stakeholder who have different levels of influence and interests in the management of maima natural tourism, 4 (four) stakeholder some of them went inside stakeholder Key factors include the village government, BUMDES Lawua, POKDARWIS, and BBTNNL. There are several obstacles in managing this tourist attraction, for example road access problems, infrastructure, and environmental problems. This obstacle can be resolved with several joint activities such as carrying out joint environmental management based on role division. Developing infrastructure and accessibility as well as building partnerships in the form of developing facilities and services for Maima tourist attractions.

Keyword: waterfalls, stakeholder interactions, Maiwa nature tourism

ABSTRAK

Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, memiliki potensi wisata alam yang strategis di Desa Lawua, terutama objek wisata Alam Maima. Pengelolaan destinasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Desa, BUMDES Lawua, POKDARWIS, dan BBTNNL. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kolaborasi pengelolaan Wisata Alam maima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4Rs untuk melihat peran stakeholder, analisis pengaruh dan kepentingan untuk melihat tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder dan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan wisata alam maima. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 13 (tiga belas) stakeholder yang mempunyai tingkat pengaruh maupun kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan wisata alam maima, 4 (empat) stakeholder diantaranya masuk kedalam stakeholder kunci antara lain pemerintah desa, BUMDES Lawua, POKDARWIS, dan BBTNNL. Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan objek wisata ini misalnya kendala akses jalan, infrastruktur, dan masalah lingkungan. Kendala ini dapat diselesaikan dengan beberapa kegiatan bersama seperti melakukan pengelolaan lingkungan bersama berdasarkan pembagian peran. Pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas serta membangun kemitraan pengembangan kemitraan dalam bentuk pengembangan fasilitas dan pelayanan objek wisata Maima.

Kata kunci: air terjun, interaksi stakeholder, wisata Alam Maima.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sigi merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai ragam kebudayaan dan juga destinasi wisata alam yang sangat strategis dan memiliki daya tarik yang tinggi serta menjadi unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu wisata alam yang mempunyai potensi tinggi di Kabupaten Sigi adalah objek wisata alam maima. Objek wisata ini memiliki 2 (dua) objek wisata yang berbeda yaitu wisata air terjun dengan ketinggian 5 meter dan juga dan juga air panas. Selain itu wisata alam yang dikelola langsung oleh desa memiliki potensi keindahan panorama alam

dan keunikan yang jarang ditemukan ditempat lain (Lindu, 2020).

Potensi wisata alam maima jika dikembangkan secara optimal akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengembangan wisata alam, menjadi sumber pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, promosi daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Desa Lawua (Mangiri dkk., 2020). Saat ini pengelolaan wisata alam maima dikelola oleh desa dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Sejarah singkat objek wisata di Desa Lawua dibuat pada Tahun 2016, dikelola seadanya oleh pemerintah desa

sebagai tempat rekreasi wisata lokal menghabiskan waktu liburan dan akhir pekan. Pada tahun 2018 pengelolaan wisata alam maima sempat terhenti dikarenakan bencana gempa yang mengakibatkan beberapa fasilitas wisata rusak dan pengelolaan wisata ini terhenti. Tahun 2019 Pemerintah Desa Lawua berinisiatif untuk membentuk POKDARWIS sebagai kelompok masyarakat yang mengelola wisata alam yang ada di Desa Lawua.

Proses pengelolaan wisata Air Terjun dan Air Panas oleh POKDARWIS, sejak awal dibentuk Tahun 2019 hingga saat ini tentu saja tidak mudah. Beragam permasalahan yang dihadapi oleh POKDARWIS, terutama upaya membangun koordinasi antar pengurus dan pemangku kepentingan lainnya serta penyediaan anggaran pengelolaan Wisata Alam Maima. Menurut Imron (2019), salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan wisata adalah dengan menyusun

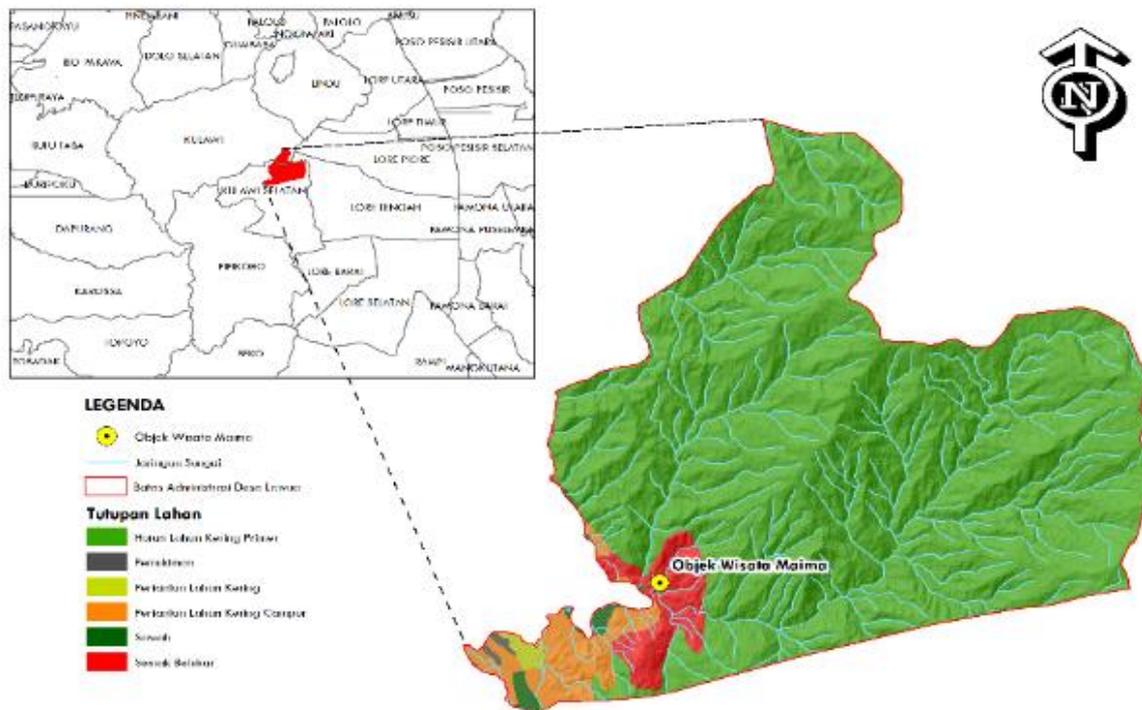
strategi pengelolaan berdasarkan peran wisata alam dengan melibatkan berbagai pemangku yang mempunyai pengaruh dan juga kepentingan dalam wisata alam tersebut.

Tujuan penelitian ini mengetahui dinamika interaksi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Alam maima; Mengukur Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Stakholder pengelolaan Wisata Alam Maima; Menyusun Strategi Kolaborasi pengelolaan Wisata Alam Maima.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai November Tahun 2023 di Objek Wisata Alam Maima Desa Lawua Kabupaten Sigi.



Gambar 1. Lokasi penelitian

Prosedur Penelitian

Pengambilan data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), dan Pemerintah Desa Lawua. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dari literatur dan dokumen dari berbagai pihak yang diamati sebagai data penunjang. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan

beberapa pendekatan yaitu, melalui pengamatan langsung dengan membandingkan kondisi data dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Wawancara kepada responden dilakukan secara mendalam, penentuan responden berdasarkan hasil wawancara dengan *stakeholder* kunci (POKDARWIS) serta pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Responden pada penelitian ini adalah 21 orang yang diambil dari:

Tabel 1. Responden penelitian

No.	Responden	Jumlah Responden (orang)
1	Pemerintah Desa Lawua	2
2	Badan Usaha Milik Desa	2
3	Kelompok Sadar Wisata	3
4	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	1
5	LSM EPPAS	1
6	Tokoh Adat	1
7	Tokoh Adat	1
8	Tokoh Agama	1
9	Masyarakat Desa Lawua	5
10	Kelompok Perempuan	1
11	Karang Taruna	1
12	Dinas Pariwisata	1
13	Perguruan Tinggi	1
Jumlah		21

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode 4Rs (*Right, Responsibility, Revenue, dan Relationship*) terhadap *stakeholder*, terkait dengan keberadaan wisata alam maima. Melalui analisis ini akan terlihat keseimbangan peran berdasarkan 4 aspek (Hak, Tanggung jawab, manfaat, dan pola hubungan) antar 13 *stakeholder* yang mempunyai peran dalam pengelolaan wisata alam maima. analisis 4Rs menjadi dasar pengambilan keputusan, membantu penyusunan rencana aksi, dan memfasilitasi dialog yang produktif di antara berbagai pihak terlibat, menjembatani jalan menuju pengembangan wisata yang berdampak positif dan harmonis bagi Desa Lauwa (Maiwa dkk., 2023)

Penelitian ini menggunakan Analisis Pengaruh dan Kepentingan (Reed dkk., 2009). Pengukuran tingkat pengaruh *stakeholder* berupa lima

pertanyaan yang diajukan melalui wawancara pada informan kunci, antara lain: kondisi kekuatan *stakeholder*; Kondisi Kelayakan *stakeholder*; kondisi kompensasi *stakeholder*; kondisi kepribadian *stakeholder*; kondisi kekuatan organisasi *stakeholder*, sementara itu untuk mengukur tingkat kepentingan setiap *stakeholder* diukur menggunakan variable yang meliputi keterlibatan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, bentuk upaya *stakeholder*, program kerja *stakeholder* dan tingkat ketergantungan *stakeholder* dalam objek wisata air terjun dan air panas Desa Maima.

Penetapan skor menggunakan panduan penilaian melalui pertanyaan untuk mengukur tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* adalah modifikasi dari model yang dikembangkan oleh Fibriantingtyas (2020). Pengukuran data berjenjang lima yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ukuran kualitatif terhadap pengaruh dan kepentingan *Stakeholder*

No.	Skor Nilai	Kriteria	Keterangan
Pengaruh Stakeholder			
1	0-5	Rendah	Tidak berpengaruh dalam pengelolaan objek wisata alam Maima
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mempengaruhi dalam pengelolaan DAS
3	11-15	Cukup tinggi	Cukup berpengaruh dalam pengelolaan objek wisata alam Maima
4	16-20	Tinggi	mempengaruhi berpengaruh dalam pengelolaan objek wisata alam Maima
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat berpengaruh dalam pengelolaan objek wisata alam Maima
Kepentingan Stakeholder			
1	0-5	Rendah	Tidak mempunyai kepentingan dalam pengelolaan objek wisata alam Maima
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan objek wisata alam Maima

No.	Skor Nilai	Kriteria	Keterangan
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup mempunyai kepentingan dalam pengelolaan objek wisata alam maima
4	16-20	Tinggi	Mempunyai kepentingan tinggi dalam pengelolaan objek wisata alam Maima
5	21-25	Sangat Tinggi	Mempunyai kepentingan sangat tinggi dalam pengelolaan objek wisata alam Maima

Jumlah skor yang didapatkan masing-masing *stakeholder* adalah pengaruh bernilai 25 poin dan kepentingan bernilai 25 poin. Hasil penetapan skor terhadap tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing *stakeholder* tersebut dikelompokkan menurut jenis indikatornya dan kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Peran Stakeholder

Keberhasilan pengembangan destinasi wisata alam alam maima memerlukan peran berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan (Pelly dkk., 2020). Tabel 3 menyajikan gambaran tentang berbagai stakeholder yang terlibat dalam proses ini, beserta peran masing-masing dalam mengembangkan, mengelola, dan mempromosikan wisata alam maima di Desa Lawua. Keterlibatan pemerintah desa hingga kelompok perempuan, peran yang beragam ini menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan dan kesejahteraan lokal.

Tabel 3. Peran stakeholder dalam pengelolaan Wisata Maima

No.	Stakeholder	Peran
1	Pemerintah Desa Lawua	Melakukan perencanaan dan pengembangan wisata alam maima yang berkelanjutan
2	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lawua	Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.
3	Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	Melakukan pengembangan program wisata alam, pemeliharaan fasilitas dan lingkungan, dan promosi destinasi wisata alam maima
4	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) Palu	Melakukan pembinaan, pendampingan serta suport anggaran pengelolaan
5	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) EPAS	Suport anggaran dan pembinaan
6	Tokoh Adat	Pembimbingan dan penjaga tradisi serta mediator
7	Sanggar Seni Lawua	Promosi budaya lokal dan pementasan penyambutan tamu dan pengunjung
8	Tokoh Agama	Pembimbingan dan penjaga tradisi serta mediator
9	Masyarakat Desa	Partisipasi pengelolaan, pembangunan infrastruktur dan penjagaan lingkungan
10	Kelompok Perempuan	Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan produk khas Desa Lawua
11	Karang Taruna	Pembinaan pemuda dan penjagaan lingkungan dan promosi wisata maima
12	Dinas Pariwisata	Pendampingan POKDARWIS dan peningkatan pelayanan umum wisata alam maima
13	Perguruan Tinggi	Penelitian, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan destinasi wisata alam Desa Lawua adalah upaya komprehensif yang melibatkan berbagai komponen dan pihak yang memiliki peran khusus. Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, penting untuk mengenali dan menghargai peran masing-masing stakeholder yang terlibat (Winarti,

2018; Yamantoko, 2019). Oleh karena itu, pada tabel 3 di atas memberikan pandangan yang holistik tentang partisipasi para pemangku kepentingan dalam mengelola destinasi ini. Dari pemerintah desa hingga organisasi masyarakat dan tokoh adat, tabel ini merinci peran yang beragam dalam

merencanakan, mengelola, dan mempromosikan pariwisata alam maima di Desa Lawua.

Keragaman peran memainkan peran penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang berfungsi dengan baik. Setiap stakeholder, dari BUMDES Lawua yang mengatur aspek ekonomi, hingga LSM EPPAS yang memberikan dukungan finansial, memiliki kontribusi unik mereka dalam memastikan bahwa destinasi ini berkembang dengan positif. Sinergi dan kerjasama di antara para pemangku kepentingan ini membentuk fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, menjaga kelestarian alam dan budaya, serta membangun daya tarik pariwisata yang berkelanjutan.

Analisis Stakeholder

Analisis 4Rs ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan tercerminkan dalam hubungan dan peran setiap stakeholder dalam pengembangan wisata alam Maima. Penghormatan terhadap hak, pelaksanaan tanggung jawab, keselarasan antara hak, kewajiban, dan manfaat, serta hubungan timbal balik yang produktif, semuanya berkontribusi pada pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif (Najib, 2021).

Mewujudkan pengembangan destinasi wisata alam yang berkelanjutan di Desa Lawua, kerjasama antara berbagai stakeholder memegang peranan sentral. Setiap stakeholder memiliki hak-hak yang harus diakui, kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi, serta manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari komitmen mereka dalam pengelolaan destinasi ini (Najib, 2021). Melalui kolaborasi ini, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta menjadi landasan kokoh untuk meraih tujuan pariwisata yang seimbang dan memberi dampak positif terhadap lingkungan, budaya, serta perekonomian lokal (Massiri dkk., 2016).

Hak-hak setiap pihak yang terlibat mencakup kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata alam Maima. Hal ini mencakup akses terhadap informasi, peluang pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan hak-hak budaya dan lingkungan. Dengan hak ini, masing-masing stakeholder dapat memberikan kontribusi yang berharga dan mendalam sesuai dengan kapabilitas mereka (Yustisi, 2018). Sejalan dengan hak-hak yang dimiliki, setiap stakeholder juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata alam. Ini mencakup tanggung jawab terhadap pelestarian alam dan budaya, pemberdayaan masyarakat lokal melalui program-program pelatihan dan ekonomi, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan wisata yang bermartabat dan berkelanjutan (Maiwa, 2018).

Terkait dinamika pengembangan wisata alam Maima, stakeholder memperoleh manfaat yang beragam. Ini mencakup pemberdayaan ekonomi melalui pendapatan tambahan, promosi dan pelestarian budaya lokal, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kualitas hidup. Selain itu, kerjasama antar stakeholder membuka peluang untuk memperluas jaringan, meningkatkan citra destinasi, serta pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang berkesinambungan. Sehubungan saling menghormati hak, melaksanakan kewajiban, dan menerima manfaat yang timbul dari kolaborasi ini, destinasi wisata alam Maima akan berkembang secara seimbang dan memberikan dampak positif kepada semua pihak yang terlibat (Maiwa dkk., 2023). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis stakeholder menggunakan pendekatan 4Rs

No.	Stakeholder	Hak	Kewajiban	Manfaat	Jalinan hubungan
1	Pemerintah Desa	pengawasan pengelolaan wisata, pendapatan dan pajak, partisipasi dalam pengambil keputusan	pengelolaan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan pendampingan stakeholder	pendapatan tambahan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktu dan promosi desa	Seluruh stakeholder
2	BUMDES Lawua	pengelolaan anggaran, pendapatan, pemberdayaan ekonomi mikro	pengelolaan dan perawatan fasilitas. Pemberdayaan masyarakat, ketaatann regulasi	pendapatan, pengembangan wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat	Seluruh stakeholder

No.	Stakeholder	Hak	Kewajiban	Manfaat	Jalinan hubungan
3	POKDARWIS	partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses informasi dan pengembangan program wisata	mengembangkan wisata yang lebih menarik, pemeliharaan fasilitas dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat	partisipasi dalam pengambilan keputusan, pemberdayan masyarakat lokal. Dan pengembangan budayaa dan peningkatan citra destinasi wisata	Seluruh stakeholder
4	BBTNLL	pengawasan dan pembinaan, pendampingan teknis dan penentuan kebijakan	pemeliharaan lingkungan, pemberan edukasi dan kerjasama dengan stakeholder	kelestarian taman nasional lore lindu, kemitraan yang bersinergi, dan kepatuhan regulasi	Pemerintah Desa, BUMDES, LSM EPASS, POKDARWI S, Perguruan Tinggi
5	LSM EPPAS	Advokasi lingkungan, partisipasi dalam kebijakan, dan edukasi masyarakat	monitoring dan kolaborasi dengan stakeholder	perlindungan lingkungan dan penghargaan nasional dan internasional	Pemerintah Desa, Bumdes, Pokdarwis, BBTNLL, Dinas Pariwisata
6	Tokoh Adat	pemeliharaan budaya dan tradisi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan	pengawasan budaya lokal, adukasi pengetahuan budaya lokal, dan kolaborasi dengan pihak terkait	budaya lokal terpeliharam pengakuan dan penghargaan	Pemerintah Desa, Bumdes, Pokdarwis, BBTNLL, Dinas Pariwisata
7	Sanggar Seni Lawua	Pengenalan budaya dan seni, penampilan pertunjukan	pemeliharaan budaya dan seni, kualitas pertunjukan, pelatihan dan pendampingan	pemberdayaan seniman lokal, penegnalan dan penghargaan, pendapatn, pertumbuh reputasi seniman	Pemerintah Desa, Bumdes, Pokdarwis, karang taruna, Dinas Pariwisata
8	Tokoh Agama	partisipasi dalam konsultasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan	penyebaran nilai nilai spiritual, edukasi keagamaan dan kolaborasi dengan pihak terkait	pengenalan ajaran agama, pemberdayaan agaman, kepentingan spritual keagamaan terjaga	Pemerintah Desa, BUMDES, Tokoh Adat, POKDARWI S, Kelompok Perempuan
9	Masyarakat Desa	partisipasi dalam pengambilan keputusan, pemberian nilai ekonomi	pemeliharaan budaya dan lingkungan, partisipasi peningkatan kualitas layanan wisata, pemberdyaan masyarakat	pendapatan tambahan, pemberdayaan ekonomi, kdan kesadaran lingkungan	Pemerintah Desa, BUMDES, POKDARWI S, Tokoh Agama, Kelompok Perempuan, Tokoh Agama, dan Sanggr Seni
10	Kelompok Perempuan	partisipasi dan keterlibatan, akses kepada pendidikan dan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi	peningkatan ketrampilan, promosi pemasaran hasil produk, kolaborasi dengan program pemberdayaan	permbdayaan ekonomi, pengakuan dan peningkatan ketrampilan, peran dalam pembngunan lokal	Pemerintah Desa, BUMDES, POKDARWI S, Tokoh Agama, Masyarakat Desa, Tokoh Agama, dan Sanggr Seni

No.	Stakeholder	Hak	Kewajiban	Manfaat	Jalinan hubungan
11	Karang Taruna	partisipasi dalam pembangunan wisata, pemberian wadah ekspresi, akses pelatihan dan pendidikan	keterlibatan dalam kegiatan, pemberdayaan pemuda dan pertumbuhan komonitas	pengembangan ketrampilan, peningkatan pengaruh, prestise dan pengembangan diri	Pemerintah Desa, BUMDES, POKDARWIS, Tokoh Agama, Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata, Tokoh Agama, dan Sanggr Seni
12	Dinas Pariwisata	akses informasi dan kolaborasi dengan pihak terkait	pendampingan, pelatihan, dan pemantauan evaluasi	pengembangan pariwisata dalam peningkatan citra daerah	Pemerintah Desa, POKDARWIS, BUMDES, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Karang Taruna
13	Perguruan Tinggi	keterlibatan dalam riset pengembangan wisata, dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan	penyediaan pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan	peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan reputasi dan pertumbuhan jaringan	Pemerintah Desa, POKDARWIS, BUMDES, BBTNLL, Pemberdayaan Perempuan, dan Karang Taruna

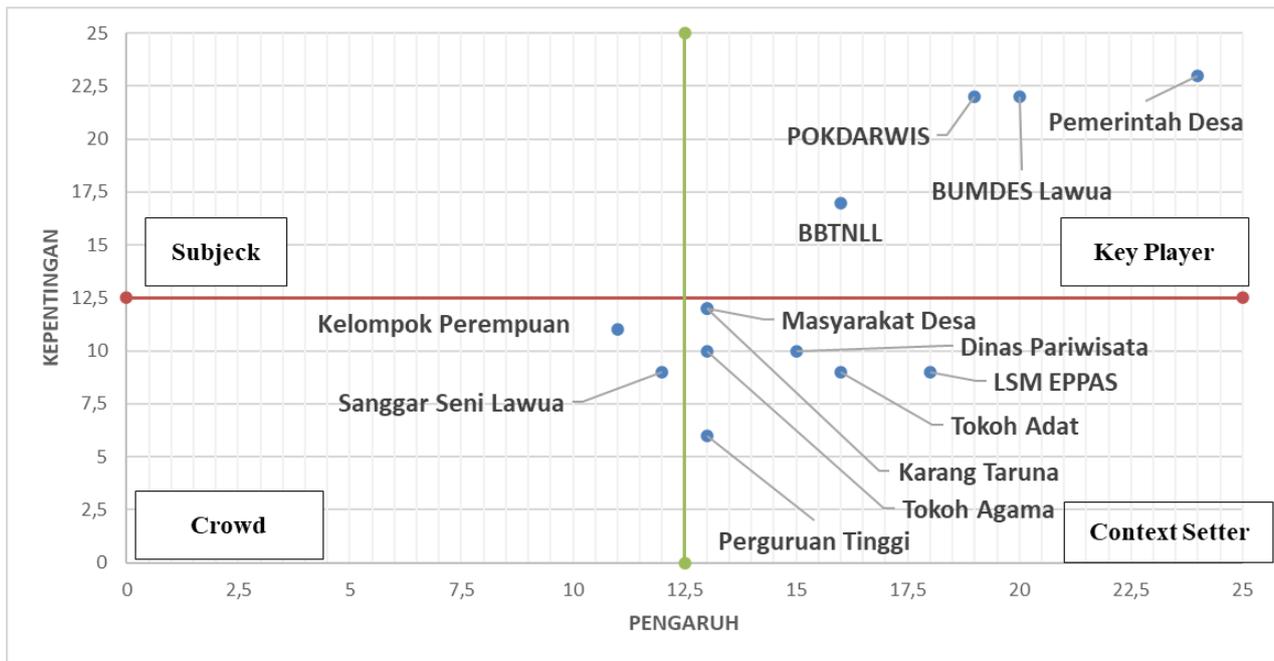
Analisis 4Rs memiliki peran sentral dalam penelitian pengembangan wisata alam Maima di Desa Lawua. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hak, kewajiban, manfaat, dan hubungan antara stakeholder, analisis ini memungkinkan identifikasi dampak, keberlanjutan, keselarasan, serta perencanaan kolaboratif yang penting dalam mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan (Rahman dkk., 2024) Tabel 4 mencerminkan adanya penghormatan terhadap hak-hak setiap stakeholder, seperti hak partisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses informasi bagi beberapa stakeholder. Selain itu data diatas menunjukkan stakeholder saling menghormati peran dan kontribusi masing-masing, seperti Pemerintah Desa yang menghormati peran POKDARWIS dalam mengembangkan program wisata alam.

Keselarasan antara hak, kewajiban, dan manfaat stakeholder telah diakomodasi dengan baik. Setiap hak dan kewajiban sejalan dengan manfaat yang diharapkan diperoleh oleh stakeholder, seperti hak partisipasi POKDARWIS yang sejalan dengan manfaat pemberdayaan masyarakat dan promosi wisata alam. Hubungan timbal balik tercermin melalui jalinan hubungan antara stakeholder. Misalnya, BBTNLL memiliki kewajiban pendampingan teknis terhadap stakeholder lain, dan dalam timbal balik, BBTNLL

juga mendapatkan manfaat dari kerjasama dengan stakeholder lain dalam menjaga kelestarian taman nasional.

Tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder adalah faktor penting dalam proses pengembangan wisata alam Maima di Desa Lawua. Dalam upaya mencapai kesuksesan dan keberlanjutan proyek pariwisata, pemahaman mendalam tentang sejauh mana stakeholder dapat mempengaruhi hasil serta seberapa besar kepentingan yang mereka miliki menjadi krusial (Anindisa dkk., 2017; Widodo dkk., 2018). Analisis ini memberikan wawasan tentang dinamika interaksi dan kontribusi masing-masing pihak terhadap tujuan proyek, memungkinkan pengelola dan pembuat keputusan untuk mengarahkan upaya mereka dengan lebih efektif (Wahyu dkk., 2019). Dengan mempertimbangkan pengaruh dan kepentingan stakeholder, strategi dapat diformulasikan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan, mengidentifikasi prioritas, dan mengalokasikan sumber daya secara bijaksana (Susilo dkk., 2016; Muhammad, 2023).

Dalam konteks ini, penelitian tentang tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rencana tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata alam Maima.



Gambar 2. Diagram pengaruh dan kepentingan

Berdasarkan gambar di atas terdapat 4 (empat) kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap pengelolaan wisata air panas dan air terjun maima, kelompok tersebut antara lain:

Stakeholder Kunci (*Key Player*)

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang sangat berpengaruh dan juga mempunyai kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan wisata alam maima. *takholder* kunci yang berperan penting dalam pembuatan regulasi, perencanaan pengelolaan wisata dan pengembangan wilayah wisata. Merujuk pada kuadran 1 (*key player*) pemerintah desa merupakan *stakeholder* yang paling berpengaruh dan juga mempunyai kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan wisata maima. Hal ini disebabkan pemerintah desa dapat mengeluarkan dan mengubah regulasi kebijakan termasuk perizinan pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan wilayah wisata maima.

Selain pemerintah Desa Lawua, terdapat 3 (tiga) *stakeholder* yang masuk kedalam kelompok *key player*; antar lain POKDARWIS, BUMDES Lawua dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. POKDARWIS merupakan organisasi yang dibawah kontrol pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap teknis pengelolaan wisata alam maima, sedangkan BUMDES Lawua merupakan lembaga usaha desa yang di tugaskan oeh kepala Desa Lawua untuk melakukan pengelolaan keuangan dibidang usaha desa termasuk wisata alam maima. Selain itu hasil analisis menunjukkan BBTNLL juga mempunyai

pengaruh yang tinggi serta kepentingan yang tinggi. Tingginya pengaruh dan kepentingan disebabkan lokasi wisata air panas dan air terjun berbatasan langsung dengan batas luar kawasan TNLL, sehingga Wisata Air Panas dan Air terjun Maima menjadi program pemberdayaan prioritas BBTNLL. wisata alam maima merupakan salah satu faktor penyebab berkurangnya aktivitas masyarakat lawua di dalam kawasan TNLL dan memperkecil konflik antar masyarakat dan BBTNLL dalam kawasan TNLL. hal ini disebabkan karena wisata alam maima telah berperan dalam mengurangi aktivitas masyarakat Lawua di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dengan menyediakan sumber penghidupan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti pariwisata. Ini membantu mengalihkan masyarakat dari kegiatan yang dapat merusak lingkungan, seperti perburuan dan penebangan liar, sehingga mengurangi tekanan pada kawasan TNLL. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya konservasi, konflik antara masyarakat dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) semakin berkurang karena adanya kesepahaman dan kerja sama dalam menjaga kelestarian alam

Subjek

Subjek merupakan kelompok *stakeholder* yang mempunyai kepentingan tinggi namun mempunyai pengaruh yang rendah dalam pengelolaan wisata alam alam maima, hasil analisis pengaruh dan kepentingan tidak di temukan adanya *stakeholder*

yang berada pada kelompok ini. Hal ini disebabkan pengelolaan *stakeholder* belum optimal, sehingga tidak terjadi efektifitas dalam menggali potensi kontribusi subjek terhadap pengembangan destinasi wisata tersebut. Strategi pengelolaan *stakeholder* yang lebih efektif diperlukan guna meningkatkan peran serta subjek dalam memajukan dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata alam maima.

Context Setter

Pengelolaan wisata alam maima teridentifikasi beberapa *stakeholder* yang mempunyai kepentingan yang rendah namun memiliki pengaruh yang tinggi, yang disebut dengan kelompok *context setter*, dalam konteks pengelolaan, kelompok *stakeholder* ini memiliki kepentingan yang rendah, namun demikian dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam pengelolaan antara izin, infrastruktur dan keberlanjutan kelestarian lingkungan

Crowd

Kelompok *stakeholder* yang tidak mempunyai kepentingan atau pengaruh dalam objek wisata maima disebut dengan kelompok *crowd*. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat dua *stakeholder* yang masuk kedalam kelompok *crowd*, yaitu kelompok perempuan dan Sanggar Seni Lawua. Kedua kelompok ini tidak memainkan peran secara substansial dalam kebijakan, keputusan dalam pengelolaan objek wisata maima. Meskipun tidak memberikan kontribusi yang signifikan namun kelompok ini dapat memberikan informasi ataupun kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan objek wisata alam maima.

Kendala Pengelolaan Objek Wisata Maima

Pengelolaan alam maima tergolong berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan jumlah pengunjung yang terus bertambah di akhir pekan. Namun demikian terdapat kendala yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan pengembangan pengelolaan wisata ini. Kendala pengelolaan terjadi di beberapa aspek, antara lain, aspek lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat lokal, promosi objek wisata, serta keamanan objek wisata (Khotimah dkk., 2022; Soselissa dkk., 2021).

Masalah lingkungan dalam pengelolaan alam maima mencakup beberapa aspek, yaitu kerusakan ekosistem, pengelolaan sampah, gangguan habitat fauna. Peningkatan jumlah pengunjung pada wisata alam maima berbanding lurus dengan peningkatan jumlah aktivitas manusia menjadi ancaman bagi ekosistem sekitar air terjun dan air

panas. Selain itu juga rendahnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya menyebabkan penumpukan sampah pada objek wisata dan berimbas penurunan keindahan objek wisata alam (Febrianti dkk., 2023; Sumarjiyanto, 2020).

Kendala infrastruktur juga menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan wisata alam maima. Kualitas jalan menuju objek wisata yang kurang memadai dapat menghambat aksesibilitas bagi pengunjung. Selain kualitas jalan yang kurang memadai, toilet yang disediakan oleh pengelola tidak bisa digunakan disebabkan tidak tersedianya air pada toilet.

Promosi wisata menjadi salah satu kendala dalam tantangan yang mempengaruhi perkembangan objek wisata air panas dan air terjun maima. Kurangnya informasi terkait keindahan objek wisata dalam media sosial membuat objek wisata ini kurang di ketahui oleh masyarakat di luar Kabupaten Sigi. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat akan pemanfaatan teknologi media sosial menyebabkan wisata alam maima kurang terpublikasi di media sosial.

Strategi Kolaborasi Wisata Maima

Pengelolaan objek wisata air terjun dan panas maima mengalami beberapa kendala dan tantangan, sehingga membutuhkan strategi kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata tersebut. Keterlibatan *stakeholder* dalam suatu pengelolaan alam dan lingkungan dapat meningkatkan keuntungan bagi seluruh pihak (Maria dkk., 2021; Manalu 2020). Strategi pengelolaan yang efektif tidak hanya melibatkan *stakeholder* kunci (*key player*) tetapi harus melibatkan seluruh *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan juga peran terhadap objek wisata maima. Melalui kolaborasi yang sinergi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari objek wisata maima sehingga dapat merinci strategi kolaborasi untuk setiap masalah yang di hadapi (Suprianto dkk., 2022; Maulana dkk., 2018).

Penyelenggaraan pertemuan reguler, pelibatan dalam proyek bersama, dan berbagi sumber daya akan membentuk landasan yang kuat untuk memajukan pengelolaan objek wisata ini menuju tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Penerapan strategi kolaborasi ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi secara aktif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh objek wisata Alam Maima, menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak terlibat. Strategi kolaborasi dalam pengelolaan objek alam Maima disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Strategi kolaborasi pengelolaan Wisata Alam Maima

No.	Strategi Kolaborasi	Rencana Aksi Bersama	Bertanggung Jawab
1	Pengelolaan lingkungan	Menyusun kelompok kerja lingkungan yang melibatkan berbagai <i>stakeholder</i> ; merencanakan program pengelolaan lingkungan keberlanjutan. Program ini termasuk upaya meningkatkan pemahaman pengunjung akan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, dan melakukan upaya pemulihan untuk menjaga keberagaman habitat fauna disekitar objek wisata.	Seluruh komponen stakeholder
2	Membangun Infrastruktur dan Aksesibilitas	Membangun kemitraan erat dengan pemerintah daerah dan lembaga donatur untuk mendapatkan dukungan dalam perbaikan jalan menuju objek wisata. Rencana pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat diusulkan bersama untuk meningkatkan aksesibilitas.	Pemerintah Desa, BUMDES Lawua, PODARWIS, BBTNLL, Masyarakat Desa, Karang Taruna, Kelompok Perempuan
3	Promosi Wisata	Menggendeng pemuda karang taruna, media lokal dan nasional, dan pemerintah daerah untuk memulai kampanye media sosial yang intensif. Menyediakan pelatihan kepada anggota POKDARWIS untuk menggunakan media sosial secara efektif dalam mempromosikan daya tarik wisata maima	Pemerintah Desa, BUMDES Lawua, Dinas Pariwisata, BBTNL.
4	Membangun Kemitraan	Perlunya membangun kemitraan dengan pemodal ataupun investor untuk bekerja sama dalam mengembangkan fasilitas dan pelayanan objek wisata. Ini bisa termasuk mendapatkan sponsor, mendanai proyek bersama, atau meningkatkan kualitas fasilitas dengan bantuan keuangan dari sektor swasta	Pemerintah Desa, BUMDES Lawua, PODARWIS, BBTNLL, LSM EPPAS
5	Sistem Pemantauan Bersama	Mendirikan sistem pemantauan berupa monitoring dan evaluasi bersama yang melibatkan semua <i>stakeholder</i> untuk mengukur dampak keberlanjutan dari setiap inisiatif dan aktivitas pengelolaan. Evaluasi akan membantu penyesuaian strategi berdasarkan hasil yang diperoleh.	Seluruh Komponen Stakeholder

Tabel 5 menggambarkan strategi kolaborasi yang komprehensif dalam pengelolaan objek wisata berbasis lingkungan. Salah satu strategi yang diusulkan adalah pembentukan kelompok kerja lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini bertujuan untuk merancang program keberlanjutan yang mencakup peningkatan kesadaran pengunjung terhadap pentingnya

menjaga lingkungan, pengelolaan sampah, dan pemulihan habitat fauna lokal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekowisata yang menekankan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi pengelolaan lingkungan (TIES, 2015). Selain itu, kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, lembaga donatur, dan sektor

swasta menjadi landasan penting dalam membangun infrastruktur dan aksesibilitas yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak dapat memberikan dampak positif dalam upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Ruhanen, 2013).

Promosi wisata yang efektif juga menjadi fokus utama dengan melibatkan kaum muda dan media dalam kampanye sosial yang intensif. Memberikan pelatihan kepada anggota POKDARWIS dalam penggunaan media sosial bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata lokal, yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta melalui investasi di fasilitas dan pelayanan wisata dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata (UNWTO, 2021). Seluruh proses ini diawasi melalui sistem pemantauan bersama yang melibatkan semua pihak terkait. Sistem monitoring dan evaluasi ini akan menjadi instrumen kunci dalam memastikan setiap langkah strategis yang diambil berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Pengembangan destinasi wisata alam air terjun dan air panas Maima di Desa Lawua menunjukkan potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Melalui identifikasi peran stakeholder, analisis 4Rs, dan penilaian tingkat pengaruh serta kepentingan, terlihat bahwa kerjasama antarstakeholder menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan. Sinergi di antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, BUMDES, dan POKDARWIS menjadi fondasi kokoh untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Maima.

Meskipun demikian, pengelolaan objek wisata masih menghadapi sejumlah kendala. Dari masalah lingkungan hingga infrastruktur yang kurang memadai, dan kurangnya promosi yang efektif, beberapa hambatan perlu diatasi. Penerapan strategi kolaboratif yang efektif dianggap sebagai langkah penting untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan keberlanjutan destinasi wisata.

Secara umum kekurangan dari penelitian ini adalah masih berfokus pada peran stakeholder dan dinamika interaksi mereka, tetapi tidak menyediakan data empiris tentang dampak nyata dari pengelolaan wisata terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal di Desa Lawua. Untuk perlu adanya penelitian lebih lanjut yang fokus pada evaluasi dampak ekonomi dan sosial dari pengelolaan wisata alam Maima, terutama

dalam hal pendapatan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, dan perubahan kualitas hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan bantuan dana penelitian melalui skema PSNI Tahun 2023. Selain itu juga penulis berterima kasih kepada Pimpinan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako dan juga Lembaga Riset Mahasiswa Kehutanan (SETMA) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindisa, M. I. T. A., Basuni, S. A. M. B. A. S., & Sunarminto, T. U. T. U. T. (2017). Stakeholder pengelolaan wisata alam SPTN Wilayah II Majalengka Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). *Media Konservasi*, 22(3), 230-241.
- Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. (2020). *Mengenal destinasi ekowisata di SPTNW II Gimpu*. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).
- Biduan, P. G. (2015). Strategi pengelolaan pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe. *e-journal*, 1(4), 1-14.
- Devy, H. A., & Soemanto, R. B. (2017). Pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam sebagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Sosiologi Dilema*, 32(1), 34-44.
- Febrianti, S. D., Aslama, A., & Putranto, A. (2023). Kendala pengembangan wisata Watu Joli di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. *Jurnal Pariwisata PaRAMA: Panorama, Recreation, Accommodation, Accessibility*, 4(1), 18-25.
- Fibrianingtyas, A. (2020). Sinergitas stakeholder dalam pengelolaan kelestarian hutan kawasan UB Forest. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 4(4), 973-984.
- Imron, M., & Anwar, M. S. (2019). Strategi kolaborasi pengembangan wisata berbasis edukasi di Clungup Mangrove Conservation Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 77-88.

- Khotimah, J., & Pawestri, A. (2022). Peran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan objek wisata pantai. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(2), 181-196.
- Kusumanto, T., El Yuliani, Macoun, P., Indriatmoko, Y., & Adnan, H. (2005). *Belajar beradaptasi: Bersama-sama mengelola hutan di Indonesia*. Bogor: CIFOR.
- Maiwa, A., Rahman, A., Pribadi, H., Hamka, H., Baharuddin, R. F., & Jardan, G. (2023). The role of stakeholders in natural tourism management of Kapopo Forest Park, Central Sulawesi. *Jurnal Penelitian Kehutanan BONITA*, 5(2), 28-37.
- Maiwa, A., Umar, S., Golar, G., & Rahman, A. (2018). Resolusi konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Warta Rimba*, 6(2).
- Mangiri, D., Siregar, H., & Rustiadi, E. (2020). Dampak ekonomi dan strategi pengembangan wisata Danau Sentani di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 4(1), 31-42.
- Massiri, S. D., Nugroho, B., Kartodihadjo, H., & Soekmadi, R. (2016). Peran para pihak terhadap keberlanjutan kesepakatan konservasi masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu. *ForestSains*, 14(1), 1-12.
- Maturbongs, E. E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Merauke. *Sumber*, 81, 59.
- Maulana, I., & Aprianto, M. C. (2018). Strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kearifan lokal: Sebuah kasus di Kampung Tajur, Purwakarta. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 50-58.
- Here are the references formatted in APA Style (7th edition):
- Najib, I. (2021). *Analisis stakeholders dalam pengelolaan The Lawu Park di wilayah RPH Blumbang, BKPH Lawu Utara, KPH Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Pamularsih, T. R. (2021). Strategi pengembangan potensi wisata alam di Desa Abangsongan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 46-54.
- Pelly, U., & Baiduri, R. (2020). *Antropologi pariwisata*.
- Rahman, A., Maiwa, A., Sangadji, M. N., Kurniawan, M., & Musbah, M. (2024). Stakeholders involved in strategic environmental assessment planning in Central Sulawesi. In *2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments 2022 Environment and Sustainable Development (ICESSD-ESD-22)* (pp. 17-21). Atlantis Press.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933-1949.
- Ruhanen, L. (2013). Local government: Facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? *Journal of Sustainable Tourism*, 21(1), 80-98.
- Soselissa, F., & Seipalla, B. (2021). Peran stakeholders dalam pengelolaan objek wisata alam Siwang Paradise di Desa Siwang Kota Ambon. *Jurnal Hutan Pulau-pulau Kecil*, 5(1), 28-39.
- Sumarjiyanto, N. (2020). Beberapa masalah dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 7(2), 124-131.
- Suprianto, A., Jumail, M., & Murianto, M. (2022). Strategi kolaborasi pramuwisata perempuan di Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara. *Journal of Responsible Tourism*, 1(3), 231-238.
- The International Ecotourism Society (TIES). (2015). *Ecotourism principles*. Retrieved from <https://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism>
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2021). *Tourism and the sustainable development goals – Journey to 2030*.
- Wahyu, W., Golar, G., & Massiri, S. D. (2019). Analisis kepentingan stakeholder dalam program pemberdayaan masyarakat di hutan desa Namo Kecamatan Kulawi. *ForestSains*, 16(2), 105-116.
- Widodo, M. L., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2018). Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 55-61.
- Winarti, N. A. (2018). Koordinasi stakeholder dalam pengembangan objek wisata air terjun Kereta di Kampung Rambang Jaya Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Yumantoko, Y. (2019). Kolaborasi stakeholder dalam penanganan destinasi wisata terdampak bencana di Taman Nasional Gunung Rinjani.

Journal Penelitian Kehutanan FALOAK, 3(1), 15-28.

Yustisi, M. J. (2018). Analisis stakeholders dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 4(1), 66-81.